

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN  
TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI DI  
KOTA PADANG**



Diajukan Oleh :

**FIRMANSYAH PRAWIRA NEGARA HASIBUAN**

1810012111185

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

**No.Reg : 13/Skipi/HTN/FH/II-2022**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

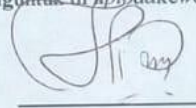
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY  
No.Reg : 13/Skipsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Firmansyah Prawira Negara Hasibuan  
Nomor : 1810012111185  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN  
TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI  
DI KOTA PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.) (Dr. Desmal Fajri S. Ag., M.H.)

# PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI DI KOTA PADANG

Firmansyah Prawira Negara Hasibuan<sup>1</sup>, Nurbeti, SH., MH<sup>1</sup>

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: [wirahasibuan05@gmail.com](mailto:wirahasibuan05@gmail.com)

## ABSTRAK

*The fulfillment of the right to education for children in the city of Padang is regulated in the Regional Regulation of the City of Padang Number 5 of 2011 concerning the implementation of education in the city of Padang. (2) what are the obstacles faced in implementing the fulfillment of the right to education for children in the city of Padang during the pandemic? (3) Efforts made in implementing the fulfillment of the right to education for children in Padang City during the pandemic? The research method used is sociological juridical research. The data used: primary data and secondary data, interview data collection techniques, document studies and qualitative analysis data: (1) Implementation of the Fulfillment of the Right to Education for Children During the Pandemic Period in Padang City is still ongoing but which previously were offline and now carried out online (2) Obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the right to education for children in the city of Padang during the pandemic such as obstacles, which are related to the economic sector, where there are some parents of students who cannot meet the needs of activities distance learning. (3) Efforts made by the government in implementing the fulfillment of the right to education for children during the pandemic by providing some assistance such as providing free quotas.*

**Keywords: Implementation, Fulfillment of Rights, Education, Pandemic, Padang**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari tiga dimensi yaitu individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik materil maupun spiritual yang memainkan peran dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat.<sup>1</sup>

Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang bisa ditafsirkan sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan karakter dengan semua aspek jangkauannya. Maka dapat disimpulkan pengajaran lebih mengarah

pada pembentukan spesialis atau bidang-bidang tertentu, oleh sebab itu perhatian dari minatnya lebih bersifat teknis.

Undang-undang Perlindungan Anak ini yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak ini di maksud sebagai Undang-Undang payung hukum (*umbrella's law*) yang mengatur hak-hak anak. Undang-undang perlindungan anak ini, dalam konsiderasi hukumnya justru tidak mencantumkan konvensi hak anak sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi konvensi hak anak yang menggunakan instrumen hukum keputusan presiden yang secara

<sup>1</sup> Nurkholis, 2013, *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi* Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1 hlm 25

hirarki lebih rendah derajatnya dari pada Undang-undang<sup>2</sup>.

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang serius bagi setiap orang. Kegiatan menjadi terkendala dengan adanya pandemi ini. Berbagai bidang terkena dampak akibat adanya pandemi ini, salah satunya pada bidang pendidikan yang ada di Indonesia.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Terhadap Anak di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2011 di masa pandemi Covid - 19 ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak oleh pemerintah Kota Padang terhadap anak di Kota Padang pada masa pandemi Covid-19?
3. Apa upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak di Kota Padang pada masa pandemi COVID-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa cara Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Terhadap Anak di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Padang Nomor 5 tahun 2011 di masa pandemi Covid - 19.

2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas pendidikan oleh pemerintah Kota Padang terhadap anak di Kota Padang pada masa pandemi Covid-19
3. Untuk menganalisa upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak di Kota Padang pada masa pandemi COVID-19

## **II. METODE PENELITIAN**

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
  - a. Data primer
  - b. Data sekunder
3. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.
4. Teknik analisa data dalam penelitian adalah analisa kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang meneliti secara rinci serta di bentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan mendalam.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Terhadap Anak Peraturan Daerah Kota Padang No 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Pandemi Di Kota Padang**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Kota Padang terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak di masa pandemi di Kota Padang mengalami sedikit hambatan , karena berdasarkan wawancara yang dilakukan di dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Padang melalui Bapak Indriyedy Bakri,. Kualitas pendidikan di

---

<sup>2</sup>Rika saraswati, 2015, " *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* " PT citra aditya bakti Bandung hlm 15

<sup>3</sup>Irinna Aulia Nafirin, 2021, *Perkembangan Pendidikan Indonesia di masa Pandemi Covid-19* hlm 2

Kota Padang tidak mengalami peningkatan, sedangkan fasilitas untuk memenuhi hak atas pendidikan terhadap anak cukup terpenuhi, sehingga pada akhir-akhir ini pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak di Kota Padang tidak mengalami peningkatan .

Mengenai pemenuhan hak atas pendidikan pada anak di Kota Padang, penulis melakukan penelitian pada 3 kecamatan di Kota Padang, yaitu Kec. Koto Tengah, Kec. Kuranji dan Kec. Padang Timur. Penulis mengambil data dari kecamatan tersebut, karena kecamatan tersebut termasuk kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan Penulis membatasi penelitiannya pada 3 Kecamatan dengan menggunakan teknik pengambilan data Purposive Random Sampling.

#### **B. Kendala-kendala dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Pandemi Di Kota Padang**

Pemerintah Kota Padang telah melakukan upaya dalam pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak, maka di temukan beberapa faktor yang menjadi kendala pada proses pemenuhan hak pendidikan tersebut, faktor tersebut di sebutkan oleh Kabid Perencanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Bapak Indriyedy Bakri. Melalui wawancara di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, diantaranya adalah ;

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Sosial
3. Faktor Psikologis

#### **C. Upaya-upaya Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang No 5 Tahun 2011 Terkait Dengan Pemenuhan Hak Atas**

#### **Pendidikan Terhadap Anak di Kota Padang Di Masa Pandemi Covid-19**

1. Upaya dalam Mengatasi Kendala Faktor Ekonomi
2. Upaya dalam Mengatasi Kendala Faktor Sosial
3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Psikologis

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian penulis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Terhadap Anak di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2011 di masa pandemi Covid - 19 Pemerintah berperan dalam penegakkan Peraturan Daerah Kota Padang No 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan Pada masa Pandemi di Kota Padang, dengan cara melakukan pengalihan pembelajaran yang awalnya tatap muka (luring) diubah menjadi pembelajaran secara online (daring). Tahun ajaran 2021/2022 pemerintah Kota Padang mengalihkan kembali pembelajaran yang tadinya secara online (daring) menjadi tatap muka (luring). (2) Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak oleh pemerintah Kota Padang terhadap anak di Kota Padang pada masa pandemi Covid-19 kendala yang dihadapi. (3) 3. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak di Kota Padang pada masa pandemi COVID-19 Pemerintah melakukan beberapa upaya.

## **B. SARAN**

Saran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang serta Pemerintah Kota Padang, dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak pada masa Pandemi Covid-19 yaitu dengan segala kendala yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang serta Pemerintah Kota Padang harus tetap mencari solusi agar bias lebih mengoptimalkan edukasi mengenai vaksinasi di Kota Padang, yang akan berdampak kepada keberlangsungan kegiatan belajar dan mengajar di lingkungan sekolah, agar kegiatan tatap muka secara 100% bias terlaksana untuk memenuhi efektifitas pemenuhan hak pendidikan anak di Kota Padang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibuk Nurbeti. S.H.,M.H, selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun atrikel dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

A.M Sadirman, 2004, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

### **C. Sumber Lainnya**

Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) dengan judul "*Impact of COVID19's Pandemic on the Economy of Indonesia*",